

The Dynamics of Political Dynasties in Indonesia

Muhammad Annizar Maulana¹, Revi Maulida², Syahrul Maghfiroh³, Tia Heni Viana⁴

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

*Corresponding Author: 05040421100@uinsby.co.id

Article	Abstract
Keywords: Dynamics, Political Dynasty, Indonesia Article History Received: Sept 3, 2025; Revised: Oct 15, 2025; Accepted: Nov 10, 2025; Published: Dec 19, 2025	<i>The dynamics of political dynasties in Indonesia reflect the evolution of the political system in its historical context. This research describes the development of political dynasties from the colonial period to the modern era, identifying factors that influence the continuity and transformation of political dynasties. Using a historical approach and contemporary analysis, this study traces the traces of political dynasties in policy changes, power structures and political participation. This research highlights political party institutions in the democratic aspect, the face of political dynasties in Indonesia and analyzes the existence of political dynasties in Indonesia in the democratic aspect. From the consolidation of colonial power to independence, political dynasties played an important role in the formation of states and constitutions. This analysis also explores the impact of political dynasties on political stability and the development of democracy in Indonesia. By paying attention to the dynamics of succession in political dynasties, this research identifies patterns of inheritance of power and the influence of political dynasties on public policy. In addition, this study evaluates society's response to the phenomenon of political dynasties, including perceptions of political justice and economic growth. This research provides a comprehensive picture of the evolution of political dynasties in Indonesia, investigating their impact on political and social developments. The implications of these findings can help design policies that encourage transparency, accountability, and citizen participation in political processes, creating a stronger foundation for future democratic development.</i>

©2025 by the author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Dinamika Perjalanan Dinasti Politik di Indonesia

Artikel	Abstrak
Kata Kunci: Dinamika, Dinasti Politik, Indonesia	Dinamika perjalanan dinasti politik di Indonesia mencerminkan evolusi sistem politik dalam konteks sejarahnya. Penelitian ini menggambarkan perkembangan dinasti politik dari masa kolonial hingga era modern, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberlanjutan dan transformasi dinasti politik. Dengan menggunakan pendekatan historis dan analisis kontemporer, studi ini menelusuri jejak dinasti politik dalam perubahan kebijakan, struktur kekuasaan, dan partisipasi politik. Penelitian ini menyoroti kelembagaan partai politik dalam aspek demokrasi, wajah dinasti politik di Indonesia dan analisis keberadaan dinasti politik di Indonesia dalam aspek demokrasi. Dari konsolidasi kekuasaan kolonial hingga kemerdekaan, dinasti-dinasti politik memainkan peran penting dalam pembentukan negara dan konstitusi. Analisis ini juga mengeksplorasi dampak dinasti politik terhadap stabilitas politik dan perkembangan demokrasi di Indonesia. Dengan memperhatikan dinamika suksesi dalam dinasti politik, penelitian ini mengidentifikasi pola pewarisan kekuasaan dan pengaruh dinasti politik terhadap kebijakan publik. Selain itu, studi ini mengevaluasi respons masyarakat terhadap fenomena dinasti politik, termasuk persepsi terhadap keadilan politik dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini memberikan gambaran komprehensif tentang evolusi dinasti politik di Indonesia, menyelidiki dampaknya terhadap perkembangan politik dan sosial. Implikasi temuan ini dapat membantu merancang kebijakan yang mendorong transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses politik, menciptakan fondasi yang lebih kokoh untuk pembangunan demokrasi di masa depan.

PENDAHULUAN

Kata *politik* berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polis* yang berarti negara atau kesatuan masyarakat yang mampu mengatur dirinya sendiri, serta *ta politika* yang berarti segala hal yang berkaitan dengan urusan negara. Oleh karena itu, politik selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya kepentingan individu atau kelompok tertentu.¹ Politik mencakup berbagai aktivitas yang melibatkan partai politik, lembaga negara, organisasi kemasyarakatan, maupun individu dalam proses pengelolaan dan pengaturan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pembahasan mengenai politik tidak dapat dipisahkan dari konsep kekuasaan. Para ahli memberikan definisi yang beragam mengenai kekuasaan. John R. Schermerhorn mendefinisikan kekuasaan sebagai kemampuan seseorang untuk memengaruhi perilaku orang lain agar bertindak sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Sementara itu, Niccolò Machiavelli memandang kekuasaan sebagai kemampuan penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya melalui berbagai cara, termasuk penggunaan kekuatan apabila diperlukan.² Berbeda dengan Schermerhorn yang lebih menekankan pada pengaruh positif dan hubungan yang saling mendukung, Machiavelli berpandangan bahwa penggunaan kekerasan dapat menjadi instrumen yang sah apabila dilakukan secara bijaksana demi menjaga stabilitas kekuasaan.

Menurut Machiavelli, seorang penguasa yang kuat harus memiliki kebijaksanaan dalam menggunakan kekuasaan. Ia berpendapat bahwa lebih baik seorang penguasa ditakuti daripada dicintai apabila kondisi tersebut mampu menjaga kehormatan, kewibawaan, dan persatuan negara. Dalam pandangannya, pusat kekuasaan harus memiliki kemampuan untuk memaksa masyarakat agar tetap tunduk dan patuh terhadap hukum. Oleh karena itu, kekuatan negara menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan pemerintahan. Meskipun pemikiran Machiavelli sering dianggap kontroversial, teorinya tetap memberikan perspektif realistis mengenai bagaimana kekuasaan diperoleh, dipertahankan, dan dijalankan dalam praktik politik.

Salah satu bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang sering terjadi adalah munculnya dinasti politik. Dinasti politik merupakan pola pewarisan kekuasaan yang didasarkan pada hubungan keluarga atau keturunan, sehingga jabatan politik cenderung dikuasai oleh sekelompok keluarga tertentu.³ Dalam artikelnya yang berjudul *Pilihan Indonesia 2009: Populisme, Dinasti, dan Konsolidasi Sistem Kepartaian*, Marcus Mietzner (2009) menjelaskan bahwa dominasi dinasti politik di Indonesia

¹ Wardoyo, "Sikap Politik Luar Negeri Indonesia Terhadap Kaum Rohingya Menurut Masyarakat Dusun Cemoroharjo Desa Candibangunan Kecamatan Pakem Sleman," *Prodi PPKn Universitas PGRI Yogyakarta* (2017), accessed December 4, 2023. Hlm 2.

² Nur Hidayati, "Dinasti Politik Dan Demokrasi Indonesia," *Orbith: Majalah Ilmiah Pengembangan Rekayasa dan Sosial* 10, no. 1 (March 1, 2014), accessed December 4, 2023. Hlm 2

³ Martien Herna Susanti, "Dinasti Politik Dalam Pilkada Di Indonesia," *Journal of Government and Civil Society* 1, no. 2 (October 30, 2017): 113.

semakin menguat. Menurutny, praktik tersebut dapat merugikan demokrasi karena melemahkan mekanisme pengawasan terhadap pemerintah yang merupakan bagian penting dari sistem *checks and balances*.

Dalam politik modern, dinasti politik sering dipahami sebagai bentuk elite politik yang dibangun atas dasar hubungan kekerabatan, perkawinan, maupun hubungan keluarga. Akibatnya, praktik tersebut kerap dipandang sebagai bentuk oligarki politik, yaitu kondisi ketika kekuasaan politik terkonsentrasi pada kelompok elite yang memiliki hubungan darah atau keluarga. Kondisi ini berpotensi mengurangi kualitas demokrasi karena kesempatan masyarakat untuk berkompetisi secara adil dalam memperoleh jabatan politik menjadi semakin terbatas.

Keberadaan dinasti politik menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan demokrasi, baik di tingkat nasional maupun daerah. Berkembangnya dinasti politik, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, tidak terlepas dari sistem rekrutmen partai politik yang masih didominasi oleh kepentingan elite. Oligarki dalam tubuh partai politik menyebabkan proses pencalonan kepala daerah sering kali tidak berjalan berdasarkan prinsip meritokrasi dan etika politik.⁴

Upaya pembatasan dinasti politik sebenarnya pernah dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Dalam Pasal 7 huruf q diatur bahwa calon kepala daerah tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa konflik kepentingan meliputi hubungan darah, hubungan perkawinan, maupun garis keturunan satu tingkat ke atas, ke bawah, atau ke samping dengan petahana, kecuali telah melewati jeda satu masa jabatan. Ketentuan tersebut diharapkan mampu membatasi praktik dinasti politik dalam pemilihan kepala daerah.

Namun demikian, ketentuan tersebut kemudian dibatalkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa larangan tersebut bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin persamaan hak setiap warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan serta melarang segala bentuk perlakuan diskriminatif. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa hubungan keluarga tidak dapat dijadikan dasar untuk membatasi hak konstitusional seseorang dalam mencalonkan diri sebagai kepala daerah.⁵

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memunculkan berbagai perdebatan. Di satu sisi, putusan tersebut memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional setiap warga negara untuk dipilih dan memilih. Namun, di sisi lain, keputusan tersebut juga dikhawatirkan semakin membuka ruang berkembangnya praktik dinasti politik. Legalitas terhadap pencalonan anggota keluarga petahana berpotensi

⁴ Martien Herna Susanti, "Dinasti Politik Dalam Pilkada Di Indonesia," *Journal of Government and Civil Society* 1, no. 2 (October 30, 2017): hlm 112.

⁵ Farida Azzahra and Indah Fitriani Sukri, "Political Dynasties in Regional Head Elections: The Crossroads Between Human Rights and Democracy," *JAPHTN-HAN*, Vol. 1, No. 1 (January 31, 2022), p. 107.

memperkuat konsentrasi kekuasaan dalam lingkup keluarga tertentu sehingga dapat mengurangi kualitas persaingan politik dan melemahkan prinsip demokrasi yang sehat.

Dalam konteks tersebut, partisipasi masyarakat sebagai pemilih menjadi faktor yang sangat menentukan. Demokrasi yang berkualitas tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan hukum dan kelembagaan politik, tetapi juga pada kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilihnya secara rasional dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, masyarakat dituntut untuk mampu menilai visi, misi, program kerja, integritas, serta kompetensi setiap calon secara objektif tanpa dipengaruhi oleh hubungan kekerabatan ataupun kepentingan politik tertentu.⁶

Partisipasi politik yang kritis merupakan hak sekaligus tanggung jawab setiap warga negara dalam menjaga kualitas demokrasi. Pemilih yang cerdas akan mampu menyaring informasi politik secara objektif serta mempertimbangkan dampak pilihannya terhadap keberlangsungan sistem demokrasi. Dengan meningkatnya kesadaran politik masyarakat, praktik dinasti politik yang berpotensi menghambat prinsip keadilan, persamaan kesempatan, dan demokrasi yang substantif diharapkan dapat diminimalkan.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji latar belakang munculnya serta perkembangan dinasti politik di Indonesia sejak masa Orde Baru hingga era Reformasi. Selain itu, artikel ini juga menganalisis dinamika perkembangan dinasti politik di Indonesia serta implikasinya terhadap penguatan sistem demokrasi dan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih demokratis, akuntabel, dan berkeadilan sosial.

METODE PENELITIAN

Untuk menghindari pengulangan penelitian serta menunjukkan posisi kebaruan (novelty) penelitian ini, penulis melakukan kajian terhadap beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan tema dinasti politik di Indonesia. Kajian pustaka ini bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta kontribusi penelitian yang dilakukan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya.

Penelitian pertama dilakukan oleh Agus Dedi yang diterbitkan dalam Jurnal Moderat pada tahun 2022 dengan judul Politik Dinasti dalam Perspektif Demokrasi. Penelitian tersebut mengkaji praktik dinasti politik di Indonesia dari perspektif demokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partai politik cenderung hanya dijadikan sebagai kendaraan politik untuk memperoleh kekuasaan, sehingga fungsi kaderisasi tidak berjalan secara optimal. Rekrutmen politik lebih banyak didasarkan pada popularitas dan kemampuan finansial calon dibandingkan dengan kapasitas dan kompetensinya. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat terwujudnya demokrasi yang sehat.⁷ Berbeda dengan penelitian tersebut, artikel ini tidak hanya

⁶ Nur Hidayati, "Dinasti Politik dan Demokrasi Indonesia," *ORBITH: Majalah Ilmiah Pengembangan Rekayasa dan Sosial* 10, no. 1 (2014): 19.

⁷ Agus Dedi, "Politik Dinasti Dalam Perspektif Demokrasi," *Jurnal MODERAT* Vol 8, No 1 (Februari 2022).

mengkaji praktik dinasti politik dari perspektif demokrasi, tetapi juga menelusuri latar belakang historis serta dinamika perkembangan dinasti politik di Indonesia dari masa ke masa.

Penelitian kedua dilakukan oleh Martien Herna Susanti yang diterbitkan dalam Jurnal Pemerintahan dan Masyarakat Madani pada tahun 2017 dengan judul Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia. Penelitian ini membahas pengaruh dinasti politik terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaringan politik berbasis hubungan keluarga menyebabkan proses rekrutmen politik menjadi kurang terbuka sehingga membatasi kesempatan masyarakat di luar lingkaran dinasti untuk berpartisipasi dalam kontestasi politik. Penelitian tersebut menegaskan bahwa penguatan demokrasi memerlukan konsolidasi kelembagaan politik yang lebih demokratis dan inklusif.⁸ Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian. Penelitian Martien Herna Susanti lebih menitikberatkan pada dampak dinasti politik terhadap pelaksanaan Pilkada, sedangkan penelitian ini menganalisis perkembangan dinasti politik dalam konteks perjalanan demokrasi Indonesia secara lebih luas.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Purwanto Putra dan Roby Rakhmadi melalui artikel berjudul Dinasti Politik dalam Pilkada dan Otonomi Daerah: Kajian terhadap Dinamika Pilkada 2020 yang diterbitkan dalam Jurnal Terekam Jejak. Penelitian tersebut mengkaji praktik dinasti politik melalui perbandingan dengan beberapa negara, dampak dinasti politik terhadap penyelenggaraan Pilkada, serta keterkaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik dinasti politik berpotensi memicu konflik politik di antara elite yang bersaing, terutama ketika pihak yang kalah dalam Pilkada tidak menerima hasil pemilihan. Konflik tersebut bahkan dapat meluas hingga mendorong mobilisasi massa dan meningkatkan ketegangan sosial di tingkat masyarakat.⁹ Berbeda dengan penelitian tersebut yang menggunakan pendekatan komparatif, penelitian ini secara khusus memfokuskan kajian pada dinamika historis perkembangan dinasti politik di Indonesia beserta implikasinya terhadap perkembangan sistem demokrasi nasional.

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian besar penelitian masih berfokus pada dampak dinasti politik terhadap demokrasi, Pilkada, maupun tata kelola pemerintahan daerah. Sementara itu, penelitian ini menawarkan perspektif yang berbeda dengan mengkaji dinamika perjalanan dinasti politik di Indonesia secara historis, mulai dari era Orde Baru hingga era Reformasi, serta menganalisis perkembangan dan tantangan dinasti politik dalam mewujudkan sistem politik yang demokratis, akuntabel, dan berkeadilan.

⁸ Martien Herna Susanti, "Dinasti Politik Dalam Pilkada di Indonesia," *Jurnal of Government and Civil Society* Vol 1, No 2 (September 2017).

⁹ Purwanto Putra dan Roby Rakhmadi, "Dinasti Politik dalam Pemilukada dan Otonomi Daerah: Kajian tentang Dinamika Pemilukada Tahun 2020," *Jurnal Terekam jejak* Vol 1, No 1.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kelembagaan Partai Politik dalam Perspektif Demokrasi

Partai politik merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi karena berfungsi sebagai sarana artikulasi dan agregasi kepentingan masyarakat yang kemudian diterjemahkan menjadi kebijakan publik melalui proses politik. Oleh karena itu, partai politik dituntut memiliki kelembagaan yang kuat, demokratis, transparan, dan akuntabel agar mampu menjalankan fungsi representasi secara optimal.

Menurut Vicky Randall dan Lars Svasand, tingkat pelembagaan partai politik dapat dianalisis melalui empat dimensi, yaitu systemness, value infusion, decisional autonomy, dan reification (public image). Keempat dimensi tersebut menunjukkan bahwa partai politik yang terlembaga dengan baik memiliki sistem organisasi yang stabil, nilai-nilai yang mengakar, kemandirian dalam pengambilan keputusan, serta memperoleh kepercayaan masyarakat.¹⁰

Dalam praktiknya, partai politik yang ideal memiliki mekanisme kepemimpinan yang demokratis, sistem administrasi dan keuangan yang transparan, serta penegakan etika organisasi yang konsisten. Selain itu, partai politik juga memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pendidikan politik dan kaderisasi guna menciptakan kader yang berkualitas sekaligus meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

Surbakti menyatakan bahwa suatu partai politik dapat dikatakan telah terlembaga apabila seluruh aktivitas organisasinya berjalan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) secara konsisten. Namun, salah satu kelemahan utama partai politik di Indonesia adalah rendahnya tingkat pelembagaan organisasi. Dalam banyak kasus, kepemimpinan partai masih sangat bergantung pada figur tertentu sehingga kedaulatan anggota dan kepentingan organisasi sering kali berada di bawah kepentingan elite partai.¹¹

Fenomena tersebut menyebabkan sebagian besar partai politik lebih berorientasi pada pencapaian kekuasaan jangka pendek dibandingkan pembangunan ideologi dan platform politik yang berkelanjutan. Akibatnya, pragmatisme politik lebih dominan daripada proses kaderisasi dan pendidikan politik yang sistematis.¹²

Di sisi lain, proses pengambilan keputusan dalam partai politik juga cenderung bersifat sentralistik. Kebijakan strategis lebih banyak ditentukan oleh elite partai di tingkat pusat daripada aspirasi kader maupun konstituen di daerah.¹³ Kondisi ini

¹⁰ Dwi Windyastuti, "Politik Representasi Perempuan: Dari Representasi Formalistik ke Representasi Substantif," makalah disajikan pada *Workshop Peran Politik Perempuan*, Center for Religious and Community Studies (CRCS), Surabaya, 5 November 2009, 118.

¹¹ Novi Winarti and Nazaki, "Problematisasi Kelembagaan Partai Politik: Studi terhadap Fungsi Representasi Partai Politik Pascareformasi," *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 4, no. 1 (August 2019): 119.

¹² Joan Richart Angulo, "Desentralisasi dan Sistem Kepartaian di Indonesia," paper presented at the *Policy Forum: Desentralisasi dan Sistem Kepartaian*, Magister Administrasi Publik (MAP) Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, August 10, 2010, 119.

¹³ Angulo, "Desentralisasi dan Sistem Kepartaian di Indonesia," 119

diperkuat oleh budaya patronase dan hubungan kekeluargaan yang masih mengakar dalam tubuh partai politik. Menurut Arie Sujito, praktik tersebut semakin memperkuat budaya feodal dan membuka ruang tumbuhnya dinasti politik melalui dominasi kelompok keluarga dalam struktur kepemimpinan partai. Tidak jarang keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) bertentangan dengan aspirasi Dewan Pimpinan Daerah (DPD), sehingga kepentingan daerah harus mengikuti keputusan elite pusat.¹⁴

Selain itu, citra partai politik di mata masyarakat sering kali lebih melekat pada figur pemimpinnya daripada institusi partai itu sendiri. Identitas partai umumnya dibangun melalui simbol-simbol seperti warna, lambang, dan tokoh sentral, sehingga keberlangsungan partai sangat dipengaruhi oleh popularitas individu tertentu.¹⁵

Secara keseluruhan, partai politik memiliki peran strategis sebagai sarana partisipasi politik masyarakat sekaligus penghubung antara rakyat dan pemerintah. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan partai politik menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya demokrasi yang sehat. Partai politik perlu membangun mekanisme internal yang demokratis, transparan, dan inklusif melalui pemilihan kepemimpinan yang terbuka, kaderisasi yang berkelanjutan, serta pengambilan keputusan secara kolektif. Dengan demikian, partai politik tidak hanya menjadi kendaraan politik untuk memperoleh kekuasaan, tetapi juga menjadi institusi demokrasi yang mampu memperjuangkan kepentingan masyarakat secara berkelanjutan.

Wajah Dinasti Politik di Indonesia

Fenomena dinasti politik menjadi salah satu karakteristik penting dalam perkembangan demokrasi Indonesia, terutama sejak era reformasi. Dinasti politik merujuk pada kondisi ketika jabatan-jabatan politik strategis diwariskan atau didominasi oleh anggota keluarga yang memiliki hubungan darah maupun hubungan perkawinan dengan pejabat politik sebelumnya.¹⁶ Praktik ini menunjukkan bahwa proses regenerasi politik sering kali tidak sepenuhnya didasarkan pada kompetensi, melainkan dipengaruhi oleh jaringan kekeluargaan dan kekuasaan.

Keberadaan dinasti politik sebenarnya telah muncul sejak masa Orde Baru melalui dominasi keluarga Presiden Soeharto. Setelah reformasi tahun 1998, praktik tersebut tidak hilang, tetapi justru berkembang dalam bentuk yang lebih beragam melalui mekanisme demokrasi elektoral. Beberapa keluarga politik bahkan mampu mempertahankan pengaruhnya melalui partai politik maupun jabatan publik di tingkat nasional dan daerah.

¹⁴ Arie Sujito, "Mencari Jalan Pembaharuan Partai Politik dan Komunikasi Politik Konstituen," dalam *Modul Pendidikan Politik: Manajemen Konstituen* (Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit, 2011), 128.

¹⁵ Joan Richart Angulo, "Desentralisasi dan Sistem Kepartaian di Indonesia."

¹⁶ Alvina Alya Rahma et al., "Pengaruh Dinasti Politik terhadap Perkembangan Demokrasi Pancasila di Indonesia," *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (June 2022): 2260.

1. Dinasti Politik Keluarga Soeharto (Keluarga Cendana)

Keluarga Cendana merupakan salah satu contoh paling awal dari praktik dinasti politik di Indonesia. Setelah Presiden Soeharto lengser pada tahun 1998, sejumlah anggota keluarganya tetap aktif dalam dunia politik. Beberapa tokoh yang terlibat antara lain:

- a. Siti Hardiyanti Rukmana (Tutut Soeharto) pernah mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Timur pada tahun 2008.
- b. Sigit Harjojudanto pernah menjabat sebagai Menteri Pertanian dan Menteri Perhubungan pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Megawati Soekarnoputri.
- c. Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto) aktif dalam politik nasional dan pernah mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat.
- d. Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto) mendirikan Partai Berkarya dan pernah menjadi anggota DPR.
- e. Partai Berkarya menjadi kendaraan politik keluarga Cendana dalam mempertahankan pengaruh politik pascareformasi.

Keterlibatan keluarga Cendana dalam politik sering kali menuai kritik karena dianggap sebagai upaya mempertahankan pengaruh politik keluarga melalui jalur demokrasi.

2. Dinasti Politik Kesultanan Yogyakarta

Praktik dinasti politik juga dapat ditemukan di Daerah Istimewa Yogyakarta melalui kepemimpinan Sri Sultan Hamengkubuwono X yang menjabat sebagai Gubernur DIY selama beberapa periode. Posisi tersebut memiliki karakteristik tersendiri karena berkaitan dengan keistimewaan Yogyakarta yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

3. Dinasti Politik Keluarga Soekarno

Keluarga Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, merupakan salah satu dinasti politik terbesar di Indonesia. Pengaruh politik keluarga ini masih berlangsung hingga saat ini melalui berbagai jabatan strategis. Beberapa tokoh penting dalam dinasti politik Soekarno antara lain:

- a. Megawati Soekarnoputri, Presiden Republik Indonesia kelima sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan.
- b. Puan Maharani, Ketua DPR RI dan putri Megawati Soekarnoputri.
- c. Guruh Soekarnoputra, yang aktif dalam dunia politik nasional.
- d. Rachmawati Soekarnoputri, yang beberapa kali terlibat dalam aktivitas politik nasional.
- e. PDI Perjuangan, sebagai partai politik yang menjadi basis utama pengaruh politik keluarga Soekarno.

Keberlanjutan pengaruh keluarga Soekarno menunjukkan bahwa hubungan genealogis masih menjadi salah satu faktor penting dalam politik Indonesia.

4. Dinasti Politik Keluarga Susilo Bambang Yudhoyono

Keluarga Presiden keenam Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), juga menunjukkan terbentuknya dinasti politik melalui Partai Demokrat. Beberapa anggota keluarga yang aktif dalam politik meliputi:

- a. Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) yang menjadi anggota DPR RI dan tokoh penting Partai Demokrat.
- b. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang pernah mengikuti Pilkada DKI Jakarta dan kemudian menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
- c. Partai Demokrat, yang menjadi kendaraan politik utama keluarga Yudhoyono.
- d. Bobby Arifianto Yudhoyono, yang dikenal aktif memberikan dukungan terhadap aktivitas politik Partai Demokrat.

Meskipun belum sekuat dinasti politik lainnya, keluarga Yudhoyono menunjukkan pola regenerasi politik melalui keterlibatan anggota keluarga dalam kepemimpinan partai dan jabatan publik.

5. Dinasti Politik Keluarga Joko Widodo

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, isu dinasti politik kembali menjadi perhatian publik karena meningkatnya keterlibatan anggota keluarga Presiden dalam politik praktis. Beberapa contoh yang sering menjadi sorotan antara lain:

- a. Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo, terpilih sebagai Wali Kota Surakarta dan kemudian mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
- b. Bobby Nasution, menantu Presiden Joko Widodo, terpilih sebagai Wali Kota Medan setelah sebelumnya aktif dalam politik elektoral.
- c. Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo, menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Fenomena tersebut memunculkan perdebatan mengenai batas antara hak politik setiap warga negara dengan potensi terjadinya konsentrasi kekuasaan dalam lingkup keluarga tertentu. Di satu sisi, setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk dipilih dan memilih. Namun, di sisi lain, dominasi keluarga tertentu dalam jabatan politik dikhawatirkan dapat mengurangi kompetisi politik yang sehat, mempersempit ruang regenerasi kepemimpinan, serta melemahkan prinsip meritokrasi dalam demokrasi.

Secara keseluruhan, dinamika dinasti politik di Indonesia menunjukkan bahwa hubungan kekeluargaan masih menjadi faktor yang signifikan dalam proses rekrutmen politik. Keberadaan dinasti politik tidak hanya dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi dan popularitas keluarga, tetapi juga oleh lemahnya kaderisasi partai politik, dominasi elite partai, serta budaya politik patronase yang masih berkembang hingga saat ini. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan partai politik dan penerapan mekanisme

rekrutmen politik yang lebih demokratis menjadi langkah penting untuk menciptakan sistem politik yang lebih kompetitif, inklusif, dan berkeadilan.

Analisis Keberadaan Dinasti Politik di Indonesia dalam Perspektif Demokrasi

Dinasti politik merupakan kondisi ketika seorang pemimpin atau penguasa menempatkan anggota keluarga maupun kerabat dekatnya pada jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Praktik ini erat kaitannya dengan politik tradisional yang berorientasi pada pelestarian kekuasaan melalui hubungan kekerabatan. Tujuan utamanya adalah membangun jaringan kekuasaan yang mampu mengendalikan lembaga-lembaga negara, baik di ranah legislatif, eksekutif, maupun yudikatif.¹⁷

Mosca, sebagaimana dikutip oleh Heryanto (2019), menjelaskan bahwa kemunculan dinasti politik berkaitan dengan kecenderungan elite politik untuk mewariskan kekuasaan kepada generasi berikutnya atau kepada individu yang memiliki hubungan keluarga.¹⁸ Pewarisan tersebut dilakukan melalui pembukaan akses terhadap jabatan politik, baik melalui mekanisme pemilihan maupun penunjukan pada posisi-posisi strategis dalam pemerintahan. Dengan cara demikian, keluarga politik memiliki peluang untuk mempertahankan pengaruh dan kekuasaannya dalam jangka panjang.

Keberadaan jabatan politik yang dapat diwariskan secara tidak langsung menjadi faktor penting dalam terbentuknya dinasti politik. Ketika elite politik memegang kekuasaan, mereka cenderung menggunakan posisi tersebut untuk membangun jalur suksesi bagi anggota keluarga atau kerabat dekatnya. Kondisi ini melahirkan jaringan kekuasaan yang didasarkan pada hubungan darah maupun perkawinan sehingga memungkinkan keberlangsungan dominasi politik dalam satu keluarga.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa dinasti politik bukan sekadar fenomena lokal, melainkan strategi yang digunakan oleh elite politik untuk mempertahankan kontrol terhadap proses politik. Penempatan anggota keluarga pada jabatan strategis memungkinkan terbentuknya jaringan kekuasaan yang kuat sehingga berbagai aspek pemerintahan dapat dikendalikan oleh kelompok yang sama. Dalam praktiknya, dinasti politik tidak hanya berorientasi pada pelestarian kekuasaan, tetapi juga memengaruhi distribusi sumber daya, kesempatan ekonomi, serta akses terhadap jabatan publik. Akibatnya, praktik tersebut berpotensi menciptakan ketimpangan sosial dan mempersempit kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi secara setara dalam pemerintahan.

Di sisi lain, konsep demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* atau *kratein* yang berarti kekuasaan atau

¹⁷ Adelia Fitri, "Dinasti Politik pada Pemerintahan di Tingkat Lokal," *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 4, no. 1 (September 8, 2019): 93.

¹⁸ Agus Dedi, "Politik Dinasti dalam Perspektif Demokrasi," *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 8, no. 1 (February 28, 2022): 96.

pemerintahan. Dengan demikian, demokrasi dimaknai sebagai sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Menurut Miriam Budiardjo (1986), demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui wakil yang dipilih melalui pemilihan umum yang bebas dan demokratis.¹⁹

Dalam praktiknya, demokrasi mengenal dua bentuk utama, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Demokrasi langsung memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan, sedangkan demokrasi perwakilan dilakukan melalui wakil-wakil rakyat yang dipilih dalam pemilihan umum. Kedua bentuk tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu menjamin partisipasi masyarakat dalam proses politik sekaligus melindungi hak-hak warga negara. Demokrasi juga menjunjung tinggi prinsip supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, serta kesetaraan setiap warga negara di hadapan hukum.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, keberadaan dinasti politik sesungguhnya tidak sejalan dengan semangat demokrasi yang menekankan persamaan hak setiap warga negara untuk memilih maupun dipilih. Konstitusi memberikan hak politik yang sama kepada seluruh warga negara tanpa membedakan latar belakang keluarga. Oleh karena itu, penguasaan jabatan publik oleh keluarga tertentu secara berkelanjutan berpotensi mengurangi kualitas demokrasi karena mempersempit ruang kompetisi politik yang sehat. Sistem politik yang didominasi oleh hubungan kekeluargaan cenderung mengedepankan loyalitas pribadi dibandingkan kompetensi dan meritokrasi, sehingga dapat menghambat lahirnya pemimpin-pemimpin baru yang berkualitas.

Fenomena tersebut telah terlihat sejak masa Orde Baru, ketika dominasi Partai Golkar dan kuatnya hegemoni pemerintah menyebabkan mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan menjadi lemah. Lembaga perwakilan rakyat yang seharusnya menjalankan fungsi pengawasan tidak mampu menjalankan perannya secara optimal karena besarnya pengaruh kekuasaan eksekutif. Kondisi tersebut menciptakan ruang yang luas bagi berkembangnya praktik dinasti politik, di mana kekuasaan terkonsentrasi pada kelompok elite tertentu. Akibatnya, pluralisme politik menjadi terbatas, sementara kesempatan bagi munculnya kekuatan politik alternatif semakin kecil.

Dalam konteks demokrasi Indonesia, keberadaan dinasti politik merupakan tantangan yang serius. Praktik tersebut berpotensi menghambat partisipasi politik yang sehat, mengurangi transparansi pemerintahan, serta melemahkan mekanisme akuntabilitas publik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan demokrasi, khususnya melalui peningkatan kualitas kaderisasi partai politik, penguatan fungsi pengawasan lembaga negara, serta penerapan sistem rekrutmen politik yang lebih

¹⁹ Nur Hidayati, "Dinasti Politik dan Demokrasi Indonesia," *ORBITH: Majalah Ilmiah Pengembangan Rekayasa dan Sosial* 10, no. 1 (March 2014): 19.

terbuka dan berbasis merit. Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan bagi seluruh warga negara untuk berpartisipasi dalam politik tanpa harus bergantung pada hubungan kekerabatan.

Selain berdampak terhadap kehidupan politik, dinasti politik juga memiliki implikasi dalam bidang ekonomi. Penguasa yang berasal dari jaringan dinasti cenderung melibatkan kelompok atau individu yang memiliki hubungan dekat dalam proses pengambilan kebijakan ekonomi. Kondisi ini dapat mengganggu persaingan usaha yang sehat, memperbesar peluang praktik kolusi dan nepotisme, serta menciptakan ketimpangan dalam distribusi sumber daya ekonomi.²⁰ Oleh karena itu, keberadaan dinasti politik tidak hanya memengaruhi kualitas demokrasi, tetapi juga berpotensi menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Dinasti politik merupakan salah satu fenomena yang terus mewarnai dinamika politik di Indonesia sejak masa Orde Baru hingga era reformasi. Praktik ini ditandai oleh keterlibatan anggota keluarga elite politik dalam menduduki berbagai jabatan strategis, baik di tingkat nasional maupun daerah. Perkembangan dinasti politik dapat dilihat melalui sejumlah keluarga politik, seperti keluarga Soekarno, Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Joko Widodo, yang menunjukkan bahwa hubungan kekerabatan masih menjadi salah satu faktor penting dalam proses rekrutmen politik di Indonesia.

Keberadaan dinasti politik menimbulkan perdebatan dalam kehidupan demokrasi. Di satu sisi, setiap warga negara memiliki hak konstitusional yang sama untuk dipilih dan memilih tanpa adanya pembatasan berdasarkan hubungan keluarga. Namun, di sisi lain, dominasi keluarga tertentu dalam jabatan publik berpotensi mengurangi kualitas demokrasi karena dapat mempersempit ruang kompetisi politik, melemahkan sistem meritokrasi, serta menghambat proses regenerasi kepemimpinan yang lebih terbuka dan kompetitif.

Keberlangsungan dinasti politik juga tidak terlepas dari lemahnya pelembagaan partai politik, dominasi elite dalam proses rekrutmen politik, serta tingginya pengaruh figur politik yang memiliki popularitas dan sumber daya politik. Kondisi tersebut menyebabkan proses pencalonan jabatan publik sering kali lebih dipengaruhi oleh faktor kekerabatan dibandingkan kompetensi dan kapasitas individu.

Ke depan, dinamika dinasti politik diperkirakan masih akan menjadi bagian dari perkembangan demokrasi Indonesia. Meskipun demikian, keberlanjutannya sangat bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat, kualitas sistem demokrasi, serta komitmen partai politik dalam menerapkan mekanisme rekrutmen yang transparan, demokratis, dan berbasis merit. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan partai politik, peningkatan kualitas pendidikan politik masyarakat, serta penegakan prinsip-prinsip demokrasi menjadi langkah penting untuk menciptakan sistem politik yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Angulo, J. R. (2010). *Desentralisasi dan Sistem Kepartaian di Indonesia*. Makalah disampaikan pada Policy Forum: Desentralisasi dan Sistem Kepartaian, Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 10 Agustus 2010.
- Azzahra, F., & Sukri, I. F. (2022). Politik dinasti dalam pemilihan kepala daerah: Persimpangan antara hak asasi dan demokrasi. *Jurnal JAPHTN-HAN*, 1.
- Dedi, A. (2022). Politik dinasti dalam perspektif demokrasi. *Jurnal Moderat*, 8(1).
- Fitri, A. (2019). Dinasti politik pada pemerintahan di tingkat lokal. *KEMUDI: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1).
- Hidayati, N. (2014). Dinasti politik dan demokrasi Indonesia. *Jurnal Orbith: Majalah Ilmiah Pengembangan Rekayasa dan Sosial*, 10(1).
- Putra, P., & Rakhmadi, R. (2020). Dinasti politik dalam pemilukada dan otonomi daerah: Kajian tentang dinamika Pemilukada Tahun 2020. *Jurnal Terekam Jejak*, 1(1).
- Rahma, A. A., et al. (2022). Pengaruh dinasti politik terhadap perkembangan Demokrasi Pancasila di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1).
- Sujito, A. (2011). *Mencari Jalan Pembaharuan Partai Politik dan Komunikasi Politik Konstituen*. Dalam Modul Pendidikan Politik: Manajemen Konstituen. Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit.
- Susanti, M. H. (2017). Dinasti politik dalam Pilkada di Indonesia. *Journal of Government and Civil Society*, 1(2).
- Wardoyo. (2017). *Sikap Politik Luar Negeri Indonesia terhadap Kaum Rohingya Menurut Masyarakat Dusun Cemoroharjo Desa Candibinangun Kecamatan Pakem Sleman*. Yogyakarta: Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas PGRI Yogyakarta.
- Winarti, N., & Nazaki. (2019). Problematika kelembagaan partai politik: Studi terhadap fungsi representasi partai politik pascareformasi. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1).
- Windyastuti, D. (2009). *Politik Representasi Perempuan: Dari Representasi Formalistik ke Representasi Substantif*. Makalah disajikan pada Workshop Peran Politik Perempuan, Center for Religious and Community Studies (CRCS), Surabaya, 5 November 2009.